

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam suatu pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah telah membuat atau menciptakan dan memberlakukan Undang – Undang yang gunanya untuk menciptakan system pengelolaan Anggran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Pemerintah juga telah melakukan perubahan mendasar terhadap Perundang – undangan dan Produk Hukum tersebut maksudnya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan . Dengan di berlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah membawa Perubahan Fundamental dalam Hubungan Tata Pemerintahan, Hubungan Keuangan dan juga perubahan dalam Pengelolaan Anggaran.

Penyusunan APBD Pemerintah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Pemerintah Tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disepakati secara bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dengan Undang-Undang dan Produk Hukum yang diberlakukan, pemerintah telah berusaha mengakomodasi dan menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam Undang-Undang dan Produk Hukum tersebut.

APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah baik langsung dan tidak langsung. Proses Penyusunan Anggaran merupakan salah satu kegiatan yang erat kaitannya dengan anggaran itu sendiri baik itu dari APBD maupun APBN, karena apabila proses penyusunan anggaran sesuai dengan prinsip penyusunannya dan prestasi kerja pada instansi pemerintah maka penyusunan anggaran yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien.

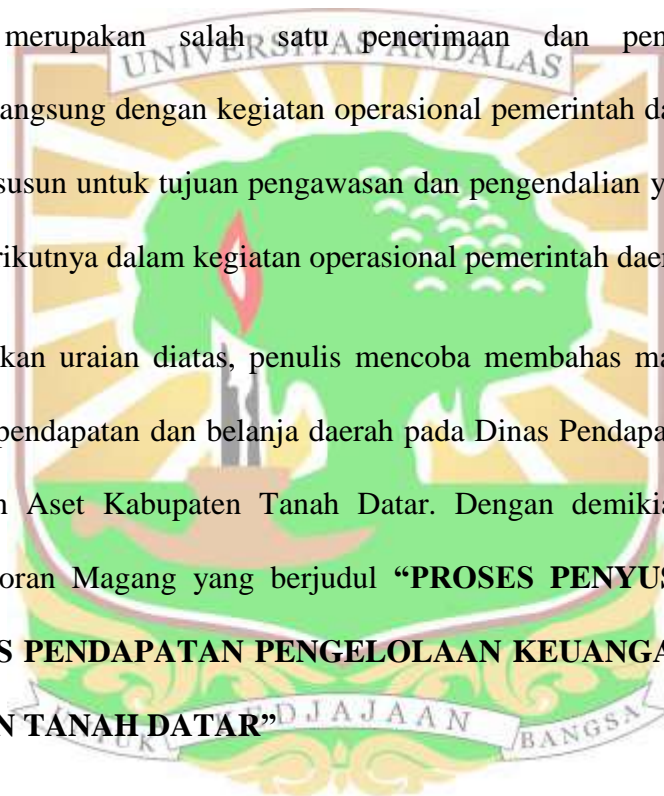
Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar juga berkewajiban mengelola pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tanah Datar, maka saya ingin mengetahui proses penyusunan anggaran pendapatannya dan belanjanya. Dalam hal ini di fokuskan pada proses penyusunan dan perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Tanah Datar.

Seluruh instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar – benar mengelola hasil pendapatan daerah yang diantaranya bersumber dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pemerintah pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengatur segala anggaran pendapatan yang ada di DPPKA Kabupaten Tanah Datar. Salah satu penerimaan yang harus direncanakan yaitu anggaran pendapatan serta pembiayaan dan belanja.

APBD merupakan salah satu penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional pemerintah daerah. Anggaran pendapatan disusun untuk tujuan pengawasan dan pengendalian yang akan terjadi pada tahun berikutnya dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba membahas masalah yang ada dalam proses pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian penulis akan membuat Laporan Magang yang berjudul **“PROSES PENYUSUNAN APBD PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN TANAH DATAR”**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Perubahan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Realisasi APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar?

1.3. Tujuan Magang

Secara umum,, tujuan diadakannya kegiatan magang bagi mahasiswa program studi Keuangan Negara Fakultas DIII Ekonomi adalah untuk memberikan bekal pengalaman berkerja bagi mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Secara khusus, tujuan kegiatan magang ini dijabarkan sebagai berikut :

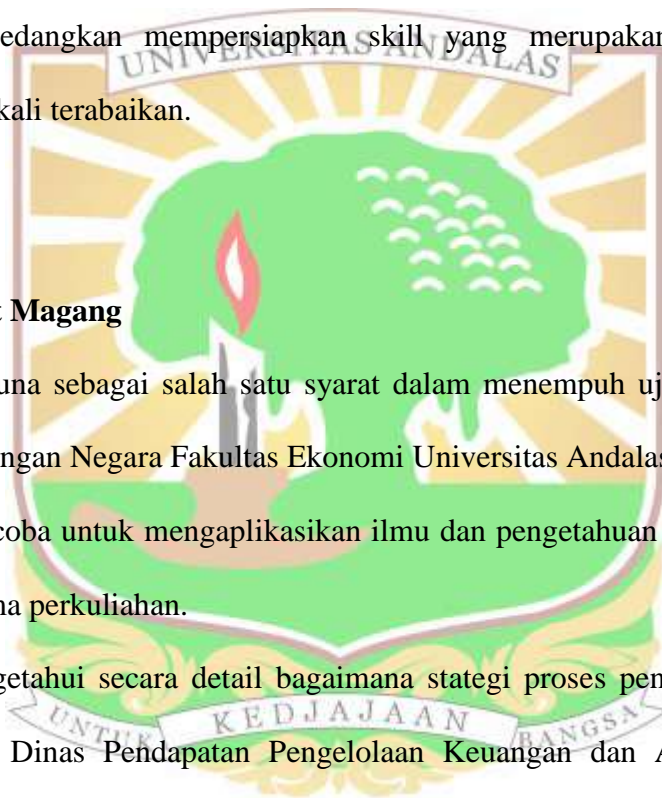
1. Mahasiswa dapat melakukan perkerjaan-perkerjaan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu pada dunia kerja.
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan ditempat kerja sesuai tugas yang dilaksanakan selama magang.
3. Mahasiswa dapat menguraikan gambaran tugas dan perkerjaan sesuai dengan kompetensi keiimuannya.

4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kendala-kendala kompetensi antara teori dan praktek dalam melaksanakan tugas selama magang pada industri atau instansi pemerintah.

Pada umumnya para calon lulusan belum sepenuhnya siap untuk terjun kemasyarakat. Permasalahannya sangat sederhana, sebagian dari mereka menganggap ijazah sudah lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan dimasa mendatang. Sedangkan mempersiapkan skill yang merupakan faktor paling penting seringkali terabaikan.

1.4. Manfaat Magang

1. Berguna sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Mencoba untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan.
3. Mengetahui secara detail bagaimana stategi proses penyusunan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aser Kabupaten Tanah Datar.
4. Menemukan hal-hal baru terkait pelaksanaan pencatatan keuangan pada SKPD
5. Sebagai persiapan untuk menghadapi lingkungan kerja.



1.5. Sistematika Penulisan Laporan Magang

Untuk mempermudah memahami laporan magang, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, perumusan masalah serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II KERANGKA TEORI

Menjelaskan tentang definisi anggaran secara umum, tujuan dan azas penyusunan APBD.

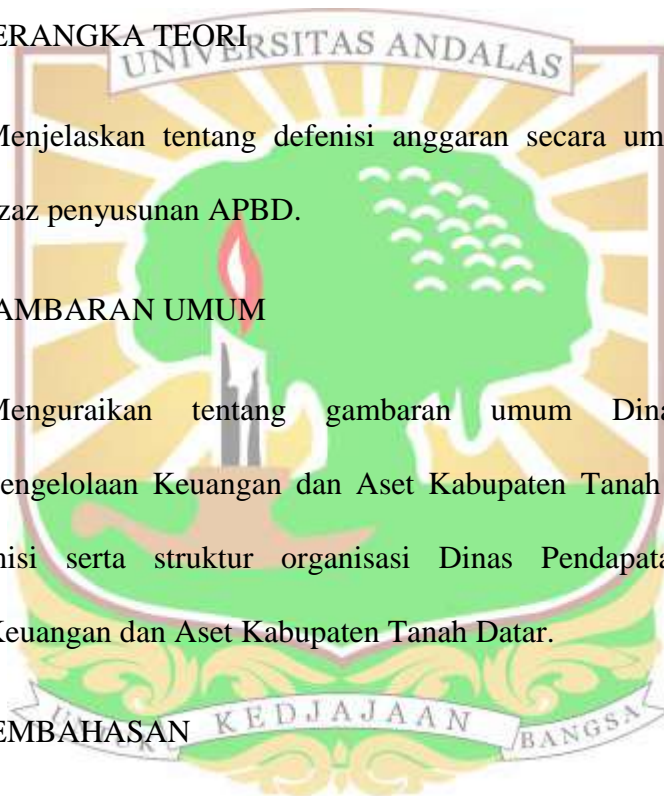
BAB III GAMBARAN UMUM

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar, visi dan misi serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang proses penyusunan APBD dan perkembangan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar.

BAB V PENUTUP



Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan laporan magang dan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

